



## PENGARUH TRANSFER KE DAERAH, KELAHIRAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

Matthew Stephanus<sup>1)</sup>; Masruri Muchtar<sup>2)</sup>; Pardomuan Robinson<sup>3)</sup>; Muhammad Heru Akhmadi<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> *matthew.stephanus@kemenkeu.go.id, Politeknik Keuangan Negara STAN\**

<sup>2)</sup> *masruri.m@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>3)</sup> *robinson@bps.go.id, Badan Pusat Statistik*

<sup>4)</sup> *heruakhmadi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

### Abstract

Starting in 2004 with the issuance of the Law on Financial Relations between the Central and Regional Governments, the era of Regional Transfers also began. This transfer to the regions is expected to solve many problems of inequality in the regions that have not been reached by the central government. Based on BPS data in 2020, Indonesia's population reached 270 million with the percentage of poor people still in double digits. The pandemic from 2020 to 2022 also contributed to the increase in poverty. The pandemic in that year increased unemployment in the community which also contributed to poverty. In addition, the high birth rate, which according to several studies, is also a contributor to poverty. This research takes secondary panel data sourced from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance. This study uses the Random-Effect model by taking data for the period 2020 to 2022. The results showed that TKD, Birth, and Unemployment together had a positive impact on poverty. However, it was found that the unemployment variable had no significant effect. With this research, the government is expected to make TKD more targeted and control the birth rate.

**Keywords:** Birth, Fiscal Decentralization, Poverty, Unemployment

### Abstrak

Dimulai pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, era Transfer ke Daerah pun dimulai. Transfer ke daerah ini diharapkan dapat menyelesaikan banyak masalah ketimpangan di daerah yang selama ini tidak terjangkau oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin yang masih dua digit. Pandemi pada tahun 2020 hingga 2022 juga turut menyumbang peningkatan angka kemiskinan. Pandemi pada tahun tersebut meningkatkan pengangguran di masyarakat yang juga turut menyumbang angka kemiskinan. Selain itu, tingginya angka kelahiran yang menurut beberapa penelitian juga menjadi penyumbang kemiskinan. Penelitian ini mengambil data panel sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan model *Random-Effect* dengan mengambil data pada periode tahun 2020 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKD, Kelahiran, dan Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun, ditemukan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat membuat TKD lebih tepat sasaran dan mengendalikan angka kelahiran.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Kelahiran, Kemiskinan, Pengangguran

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 270.203.917 jiwa berdasarkan Survey Penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2020. Jumlah penduduk ini masih akan terus meningkat di tahun-tahun akan datang, yang mana Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 (Warsito dkk., 2019). Bonus demografi ini tentu saja didukung oleh jumlah kelahiran bayi yang masih tinggi di Indonesia.

Banyaknya penduduk ini juga sebanding lurus dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan adalah terjadinya ketidakmampuan seseorang ataupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro & Smith, 2020). Dia juga menjelaskan bahwa populasi yang tinggi, rendahnya lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan adalah ciri-ciri negara miskin dan berkembang (Todaro & Smith, 2020). Sejak awal abad ke-21, presentase penduduk miskin Indonesia selalu berada di angka dua digit. Angka ini membaik sejak tahun



2018 dengan keberhasilan Indonesia menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10%. Adapun persentase penduduk miskin Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Penduduk Miskin di Indonesia**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kemiskinan	10.78	10.38	9.74	9.32	9.99	9.93	9.56

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tren penurunan penduduk miskin yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 dan 2020. Peningkatan ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pandemi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan pengangguran dan meningkatkan penduduk miskin. Dalam table 1 terlihat terjadi penurunan penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 yang sebelumnya 9.93% menjadi 9.56%. Penurunan ini terjadi tentu saja terjadi dengan campur tangan pemerintah melalui belanja negara yang salah satunya alatnya adalah dana transfer ke daerah. Studi terbaru menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan oleh negara dapat membantu menurunkan kemiskinan sebuah negara (Anderson dkk., 2018)

Dalam menghadapi kemiskinan, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan-kebijakan dalam level mikro dan makro. Di level ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga, dan menciptakan kesempatan kerja. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana untuk berinvestasi pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Di level mikro, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa bantuan pangan non-tunai, bantuan tunai, dan dukungan penerima bantuan iuran bagi masyarakat miskin. Ini merupakan upaya-upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan "*poor budget*" yakni kebijakan anggaran yang bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat kurang mampu (Sigit & Kosasih, 2020).

Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mendefinisikan Transfer Ke Daerah adalah dana bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer ke daerah merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dimana kekayaan daerah yang dikumpulkan oleh pusat kemudian dibagikan kembali secara proporsional, merata, maupun menjadi insentif bagi daerah untuk memajukan daerahnya. Transfer ini diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah-nya saja. Leganya ruang fiskal ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang pada hakikatnya secara tidak langsung akan menurunkan kemiskinan (Nurriszqi dkk., 2023)

Pada tahun 2024, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2023 menganggarkan TKD sebesar Rp857,5 Milyar yang kemudian akan dibagi menjadi beberapa jenis transfer. TKD oleh peraturan perundang-undangan yang ada dibagi atas 6 (enam) jenis transfer. Keenam jenis tersebut adalah Dana Alokasi Umum, yang oleh pemerintah dibagi dengan proporsi 14,1% untuk pemerintah provinsi dan 85,9% untuk pemerintah kabupaten/kota. Dana Bagi Hasil, yang terdiri atas DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam, dan DBH lainnya berupa perkebunan sawit. Dana Alokasi Khusus, yang terdiri atas DAK Fisik, DAK Non-Fisik, dan Hibah Daerah. Dana Otonomi Khusus yang terbagi atas Otsus Pulau Papua, Otsus Aceh, dan Dana Tambahan Infrastruktur. Dana Keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Desa, yang dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar sebesar 65%, Alokasi Formula sebesar 30%, Alokasi Kinerja sebesar 4%, dan Alokasi Afirmasi sebesar 1%.

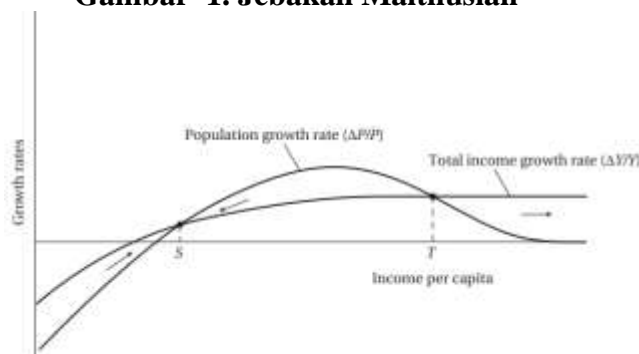
Besarnya dana TKF yang diberikan oleh pemerintah merupakan bagian dari usaha mewujudkan desentralisasi yang salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal



adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial yang salah satunya adalah masalah kemiskinan (Syamsul, 2020). Selain mengatasi kemiskinan, desentralisasi fiskal adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum dan juga bentuk penerapan sila keempat Pancasila yakni negara yang lebih demokratis (Christia & Ispriyarso, 2019). Pelayanan publik yang baik tentu saja menciptakan pemerintah yang akuntabel, bersih, tingginya partisipasi masyarakat, pembangunan berkeadilan, dapat mengurangi ketimpangan yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat (Hastuti, 2018).

Tingginya angka kelahiran dan tingginya populasi adalah salah satu ciri dari negara berkembang dan miskin (Todaro & Smith, 2020). Hal ini sejalan juga dengan teori Malthusian yang dipopulerkan oleh Robert Malthus. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, misalnya 1, 2, 4, 16, 32. Sementara itu di sisi lain, pertumbuhan sumber makanan atau produksi pangan mengikuti deret hitung, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 (Raharto, 2020). Dapat ditarik premis bahwa semakin banyaknya penduduk dengan tidak ditopang oleh pertumbuhan pangan akan meningkatkan kemiskinan. Malthus menyederhanakan produksi pangan dengan Total Income Growth Rate, dan pertumbuhan penduduk dengan Population Growth Rate (Todaro & Smith, 2020). Penyederhanaan ini akhirnya melahirkan jebakan Malthusian. Jebakan ini bermakna bahwa pertumbuhan penduduk akan menipiskan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kemiskinan (Macfarlane, 2003; Roy & Riello, 2018). Jika ditarik dalam kurva, makan jebakan Malthusian akan berbentuk seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 1. Jebakan Malthusian**



Sumber: Economic Development by Todaro & Smith (2020)

Pengangguran adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara. Salah satu penyebab utama pengangguran di medio tahun 2020 hingga tahun 2022 adalah pandemi Covid-19. Data menunjukkan bahwa terdapat 1.205.191 jiwa yang dipecat dari sektor informal, 212.394 jiwa yang dipecat dari sektor formal, dan 282.000 jiwa yang dirumahkan tanpa pendapatan (Ramadhani dkk., 2022). Tingginya pengangguran ini juga diperparah dengan banyaknya populasi penduduk muda. Banyak populasi penduduk muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan bahkan banyak penduduk muda yang kesulitan untuk mendapat pekerjaan informal di perkotaan (Todaro & Smith, 2006). Keynes dalam Keynesian Theory-nya menyatakan bahwa rendahnya permintaan yang mana disebabkan oleh kemiskinan dapat menyebabkan peningkatan pengangguran vice versa (Mankiw, 2020).

Studi-studi yang mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi masih terbatasnya penelitian yang menganggakatkan isu kelahiran penduduk dan transfer ke daerah secara sama-sama. Terbatas pula studi yang menunjukkan manfaat dari transfer ke daerah di masa pandemi dan juga pengangguran di masa pandemi. Maka penelitian ini diadakan untuk menggabungkan secara bersama-sama dampak dari ketiga variabel bebas yakni transfer ke daerah, kelahiran, dan pengangguran terhadap kemiskinan.



## **KAJIAN PUSTAKA**

Telah terdapat banyak penelitian yang membahas tentang Transfer Ke Daerah, Angka Kelahiran, dan Penangguran dengan variabel terikat yang berbeda-beda. Terdapat studi yang menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan (Anderson dkk., 2018; Wahyudi, 2020). Dalam studi yang dilakukan secara spesifik di wilayah tertentu seperti Provinsi Riau (Isramiwarti, 2017), Jawa Tengah (Nurmainah, 2013), dan Kabupaten Blora (Evita & Primandhana, 2022), serta dalam wilayah lebih luas yakni seluruh Pulau Sumatera dan Jawa (Rambe dkk., 2020) menunjukkan bahwa belanja pemerintah dapat menurunkan kemiskinan. Dalam topik yang sama, sebuah studi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, peningkatan standar deviasi belanja pemerintah sebesar \$1.556 dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0,61% pada orang dewasa (Hidalgo-Hidalgo & Iturbe-Ormaetxe, 2018).

Desentralisasi Fiskal yang dalam hal ini di Indonesia melalui Transfer Ke Daerah juga berdampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan (Syamsul, 2020; Tselios & Rodríguez-Pose, 2022). Secara spesifik bahkan salah satu bentuk TKD di Indonesia yakni di Dana Desa mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0.04% untuk setiap Rp1 Triliyun rupiah yang dikeluarkan (Azzahra dkk., 2022). Bahkan di Pantai Gading, telah terbukti bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya menurunkan kemiskinan, namun juga mampu meredakan konflik di negara afrika tersebut (Tiangboho Sanogo, 2019). Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan di beberapa kota di Sulawesi Utara tepatnya di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Bolaang Mongondouw yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak memberikan pengaruh dalam menurunkan kemiskinan (Rotinsulu & Tenda, 2016). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sebagian transfer ke daerah seperti DAK dan DAU malah berkorelasi positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Widodo & Zakiah, 2022).

Selain penelitian tentang desentralisasi fiskal, terdapat pula penelitian tentang kelahiran penduduk. Studi yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur (Mahsunah, 2017), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nalle dkk., 2022), Kabupaten Gresik (Cahyani, 2022), dan Kota Palembang (Suhandi dkk., 2018) yang menunjukkan secara parsial maupun simultan bahwa angka kelahiran berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin suatu daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia terdapat angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk secara positif dan signifikan meningkatkan kemiskinan di Indonesia (Sianturi dkk., 2021).

Studi yang dilakukan di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap penambahan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1%, maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 7,6% (Sebriana & Cahyono, 2022). Studi lain yang dilakukan di Kabupaten Pelalawan (Sagala & Harlen, 2023) dan Provinsi Kepulauan Riau (Usman & Diramita, 2018) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berkorelasi secara parsial dalam menaikkan kemiskinan. Terdapat pula studi lain yang dilakukan di Aceh pada tahun 2020. Studi ini menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan (Rizal dkk., 2020).

### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memeratakan porsi pembangunan dan keuangan. Hal ini sejalan dengan Sila ke 5 Pancasila yakni: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Desentralisasi di Indonesia pertama kali dicetuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi Fiskal diharapkan dapat memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan sendiri daerahnya (Nurrisqi dkk., 2023).



Transfer Ke Daerah dibagi atas Pure Block Grant dan Matching Grant. Pure Block Grant diberikan dengan tidak terikat, sementara Non-Matching Grant diberikan dengan sektor-sektor tertentu. Adapun dampak yang diharapkan dari Transfer Ke Daerah dengan metode Pure Block Grant adalah efek pendapatan dimana terjadinya peningkatan belanja pemerintah dan belanja pribadi secara bersamaan. Di sisi lain Matching Grant diharapkan memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk menjalankan program-program dan kegiatan pada sektor-sektor tertentu (Puspita dkk., 2021).

### **Angka Kelahiran di Indonesia**

Permasalahan kependudukan maka menjadi masalah bagi pemerintah di Indonesia (Indraswari & Yuhan, 2017). Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa angka kelahiran (total fertility rate) Indonesia berada di angka 2,1. Angka ini bermakna bahwa setiap perempuan Indonesia secara rata-rata melahirkan tiga orang anak atau lebih. Hasil SP 2020 ini masih di atas total fertility rate normal di angka 2. Tingginya angka kelahiran ini berkorelasi dengan kemiskinan di suatu negara. Negara miskin dan berkembang cenderung memiliki pertumbuhan populasi dan jumlah penduduk yang tinggi (Todaro & Smith, 2020).

Tingginya kelahiran menunjukkan bahwa akan semakin banyak waktu yang dihabiskan orang tua untuk mengurus anaknya. Semakin tingginya waktu yang dihabiskan ini tentu akan menggerus waktu dari orang tua untuk berproduksi dalam perekonomian. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya trade-off antara mengurus anak dan bekerja lebih banyak lagi. Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa urusan di rumah menjadi kontraproduktif dengan pekerjaan (Sulistiowati & Komari, 2021)

### **Pengangguran**

Pengangguran, gepeng, buruh, pedagang kaki lama, dan beragam pekerjaan informal lainnya dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin (Kadji, 2017). Kelompok-kelompok ini seringkali terpengrangkap dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural dimana mereka berada dalam lingkaran setan yang sulit untuk keluar dari kemiskinan. Badan Pusat Statistik mengukur pengangguran dengan membandingkan besaran pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi angkanya, maka semakin banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar. Pengangguran juga seringkali menjadi fokus utama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pengangguran sendiri menjadi faktor utama daripada penghasil kemiskinan bersama-sama dengan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya tingkat kesehatan (Faturohim dkk., 2023).

Sejalan dengan Faturohim (2023) yang menyatakan bahwa faktor kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pengangguran saja, tetapi juga faktor pendidikan dan kesehatan. Maka selanjutnya kemiskinan dibagi atas empat bentuk yakni kemiskinan absolut: kondisi dimana seseorang benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian ada kemiskinan relative: kondisi dimana seseorang menjadi miskin akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata. Lalu ada kemiskinan kultural: kondisi dimana seseorang menjadi miskin akibat faktor budaya seperti boros, berfoya-foya, dan sejenisnya. Terakhir kemiskinan struktural: kondisi dimana seseorang sulit meraih sumberdaya yang malah menambah kemiskinan.

Berdasarkan studi-studi terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan hipotesis:

H0: Transfer Ke Daerah, Angka Kelahiran, dan Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penduduk Miskin

H1: Transfer Ke Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penduduk Miskin

H2: Angka Kelahiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penduduk Miskin

H3: Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penduduk Miskin

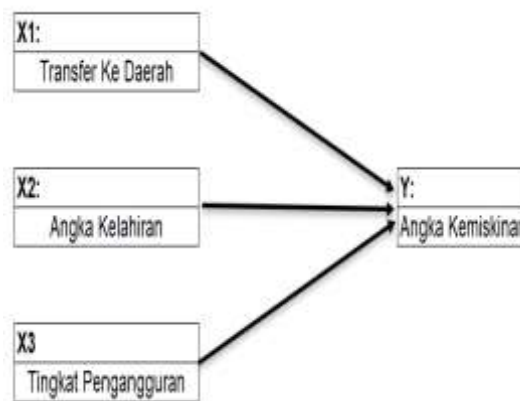


## METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode kuantitatif. Metode ini melakukan pengujian terhadap data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk statistik (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan, sedangkan variabel bebas terdiri atas transfer ke daerah, angka kelahiran, dan pengangguran.

Data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data panel bersifat sekunder yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik dan pengolahan dari portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Data panel adalah gabungan antara data yang dikumpulkan secara *cross-section* dan data *time-series*. Data *cross-section* dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan data *time-series* meliputi data-data yang dikumpulkan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Seluruh variabel terikat dan variabel bebas dalam penulisan ini dapat digambarkan menjadi:

**Gambar 2 Kerangka Penelitian**



Sumber: Diolah Penulis

Penulisan ini menggunakan regresi data panel dalam melakukan analisa data. Setidaknya ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam melakukan regresi ini. Ketiga pendekatan tersebut adalah Pooled Least Square, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Dalam menentukan satu diantara tiga pendekatan ini, maka dilakukan tiga cara pengujian yakni Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange (Robinson Sihombing et al., 2021). Setelah ditemukan model yang diinginkan maka dilakuka uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastis. Setelah selesai dilakukan pengujian model penelitian dan pengujian asumsi klasik, maka akan dilakukan uji statistic F, uji statistic t, dan pengamatan koefisien R square. Bentuk persamaan linier yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Penduduk Miskin
- A : Konstanta
- $\beta_1 X_1$  : Koefisien Transfer Ke Daerah
- $\beta_2 X_2$  : Koefisien Angka Kelahiran
- $\beta_3 X_3$  : Koefisien Tingkat Pengangguran
- E : Standard Error



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Variabel

Sebelum penelitian ini dilakukan uji analisa regresi, maka dilakukan pengujian statistika deskriptif untuk melihat persebaran variabel bebas dan variabel terikat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022. Adapun hasil pengujian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Analisa Statistika Deskriptif**

Variabel	Mean	Std. Dev	Min.	Max
MISKIN	10,33	0,47	3,82	21,7
TKD	98,21	0,29	84,23	108,52
TFR	2,29	0,02	1,73	2,79
TPT	5,49	0,19	2,34	10,95

Sumber: Diolah Penulis

Dari hasil pengujian pada Tabel 2, diketahui bahwa rata-rata variabel terikat yakni penduduk miskin (MISKIN) sebesar 10,33 dengan standar deviasi senilai 0,47. Perbedaan penduduk miskin cukup timpang dimana terdapat provinsi dengan persentase kemiskinan sebesar 3,82, namun terdapat provinsi dengan persentase kemiskinan sebesar 21,7. Hal ini menunjukkan bahwa jurang kemiskinan antar provinsi di Indonesia masih sangat lebar. Selain itu data rata-rata ini juga menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit.

Selanjutnya, pada variabel bebas Transfer Ke Daerah (TKD) ditemukan bahwa rata-rata realisasi penyerapan dana ini sebesar 98,21 dengan standard deviasi sebesar 0,29. Sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022, terdapat perbedaan realisasi penyerapan antar provinsi di Indonesia dimana terdapat provinsi yang hanya mampu menyerap sebesar 84,23 dan terdapat provinsi yang mampu menyerap sebanyak 108,52. Data ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah-pemerintah provinsi di Indonesia untuk menyerap transfer hingga maksimal.

Pada variabel bebas angka kelahiran (TFR) ditemukan bahwa rata-rata angka kelahiran di Indonesia adalah sebesar 2,29 dengan standar deviasi 0,02. Selain itu terdapat perbedaan cukup signifikan angka kelahiran diantara provinsi yang ada dimana terdapat provinsi dengan angka kelahiran 1,73 yang mana di bawah angka dianjurkan yakni 2. Di sisi lain terdapat provinsi dengan angka kelahiran 2,79, yang mana jauh melebihi dari angka yang dianjurkan. Hal ini tentu saja belum berhasilnya program keluarga berencana dalam melakukan kontrol populasi.

Terakhir pada variabel bebas tingkat pengangguran (TPT) ditemukan bahwa rata-rata pengangguran di Indonesia cukup tinggi yakni 5,49 dengan standar deviasi sebesar 0,19. Selain itu ditemukan terdapat perbedaan mencolok dalam persebaran penangguran dimana terdapat provinsi dengan tingkat pengangguran sebesar 2,34, tetapi terdapat provinsi dengan tingkat pengangguran sebesar 10,95

### Uji Spesifikasi Model

Penelitian ini menggunakan analisa data model dengan memilih menentukan model regresi terbaik di antara *Pooled Least Square*, *Fixed-Effect Model*, ataupun *Random-Effect Model*. Setelah dilakukan pengujian, maka didapatkan hasil pengujian sebagaimana dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Signifikasi Antar Model**

Jenis Pengujian	P-Value	Pemaknaan
F-Test (Uji Chow)	0,00	Fixed-Effect Model tidak lebih baik daripada Pooled Least Square
Uji Hausman	0,7248	Fixed-Effect Model tidak lebih baik daripada Random-Effect Model
Uji Lagrange Multiplier (LM)	0,00	Random-Effect Model lebih baik daripada Pooled Least Square

Sumber: Diolah Menggunakan STATA



Berdasarkan tabel di atas, maka permodelan yang dipilih adalah *Random-Effect Model*. Dalam Tabel 5 juga ditemukan bahwa data terdapat gejala autokorelasi dan homoskedastis. Untuk mengatasi gejala ini maka dilakukan permodelan dengan metode Robust. Metode Robust adalah metode yang mampu memberikan hasil terbaik meskipun terdapat asumsi model yang tidak lolos ataupun terdapat kontaminasi data (Daszykowski dkk., 2007). Sehingga setelah dilakukan *Robust*, perhitungan *Random-Effect Model* dapat di lihat seperti di bawah ini:

**Tabel 4 Random-Effect Model**

Model	Random-Effect Model
R-Square	-7.269
TKD	0.039
lnTFR	4.801
TPT	0.132

Sumber: Diolah Menggunakan STATA

### Uji Asumsi Klasik

Studi ini menggunakan empat jenis pengujian asumsi klasik. Adapun keempat jenis tersebut adalah Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Autokorelasi (Gujarati & Porter, 2009). Hasil pengujian ini dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. Uji Asumsi Klasik**

Jenis Pengujian	P-Value	VIF	Pemaknaan
Uji Normalitas	0,128		Data lolos uji
Uji Heterokedastisitas	0,029		Tidak Memenuhi
Uji Multikolinearitas		1,18	Data lolos uji
Uji Autokorelasi	0,012		Tidak Memenuhi

Sumber: Diolah Menggunakan STATA

### Regresi Data Panel *Random-Effect Model*

Setelah dilakukan pengujian spesifikasi model dan asumsi klasik, maka dilakukan regresi data yang didapatkan hasilnya seperti di bawah ini:

**Tabel 6 Hasil Regresi Random-Effect Model**

Rsquare		96,79		
F		936,14		
Prob > F		0		
Miskin	Coef.	Std. Error	Z	P>  z
TKD	0,039	0,200	1,97	0,049
lnTFR	4,801	1,929	2,49	0,013
TPT	0,132	0,082	1,53	0,127
Cons.	-7,269	1,941	-3,74	0

Sumber: Diolah Menggunakan STATA

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa Probabilitas F senilai kurang dari 0,05 sehingga sesuai dengan konsep pengujian dimana gagal tolak  $H_0$ . Pengujian tersebut juga menghasilkan Rsquare sebesar 96,79 yang bermakna variabel bebas yang terdiri atas Transfer Ke Daerah, Angka Kelahiran, dan Tingkat Penangguran mampu mengukur variabel terikat berupa Kemiskinan sebesar 96,79%. Sementara sisanya sebesar 3,21% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model tersebut. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka model penelitian ini dapat dijelaskan melalui persamaan:

$$\text{MISKIN} = -7,269 + 0,039\text{TKD} + 4,801\text{lnTFR} + 0,132\text{TPT}$$

### Pengaruh Transfer Ke Daerah terhadap Kemiskinan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa transfer ke daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien dari variabel transfer ke daerah sebesar 0,039. Angka ini bermakna bahwa setiap kenaikan realisasi transfer ke daerah sebesar 1% akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,039% dengan syarat variabel lain tidak berubah. Berdasarkan pengujian probabilitas, variabel transfer ke daerah



berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai 0,049 atau dengan kata lain kurang dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa transfer ke daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo & Zakiah (2022) yang menyatakan bahwa sebagian transfer ke daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena TKD seperti DAK memang tidak ditujukan untuk menurunkan kemiskinan, namun untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini juga sejalan dengan belanja daerah di sebagian kota/kabupaten di Sulawesi utara yang justru tidak mendorong kemiskinan (Rotinsulu & Tenda, 2016). Hal ini terjadi karena belanja yang tidak dapat mencapai outcome yang diharapkan karena tidak tepat sasaran.

### **Pengaruh Angka Kelahiran terhadap Kemiskinan**

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa angka kelahiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Hasil pengujian pada tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien dari variabel angka kelahiran sebesar 4,801. Hasil ini bermakna bahwa setiap kenaikan angka kelahiran sebesar 1% akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 4,801% dengan syarat variabel lain tidak berubah. Uji Probabilitas variabel angka kelahiran juga bernilai 0,13 yang mana bernilai kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan temuan lain di 25 negara Afrika yang menunjukkan bahwa tingginya fertilitas sejalan dengan tingginya angka kemiskinan (Schoumaker, 2004).

Dalam konteks lokal, temuan ini juga sejalan dengan studi di Palembang yang dilakukan oleh Suhandi (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kemiskinan sehingga studi ini menyarankan untuk menunda masa perkawinan untuk menunda kelahiran. Terdapat pula temuan Cahyani (2020) di Gresik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengembangan sumber daya manusia sehingga angka kelahiran dan kematian kurang seimbang. Todaro (2020) dalam bukunya juga menyatakan bahwa tingginya angka kelahiran adalah ciri dari negara berkembang dan miskin.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Pengujian pada tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien dari variabel terikat pengangguran sebesar 0,132. Nilai ini bermakna bahwa peningkatan pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,132% dengan syarat variabel lainnya tidak berubah. Uji probabilitas tingkat pengangguran juga bernilai 0,127 yang mana melebihi batas maksimal 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan di Kediri oleh Sebriana (2022), di Pelalawan oleh Sagala & Harlen (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Secara spesifik terdapat pula studi yang mendukung hasil ini yang dilakukan di Aceh oleh Rizal (2020) dengan hasil tingkat pengangguran berpengaruh secara positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara menyakinkan dengan angka 96,79%. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel transfer ke daerah dan angka kelahiran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini bermakna bahwa peningkatan realisasi transfer ke daerah dan peningkatan angka kelahiran akan berdampak pula



pada peningkatan kemiskinan di Indonesia secara signifikan. Variabel lain yakni tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan secara positif berdampak pada kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan kedua variabel bebas sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat pengangguran akan juga meningkatkan angka kemiskinan. Terdapat perbedaan pada signifikansi dampak dimana tingkat pengangguran tidak berdampak secara langsung terhadap angka kemiskinan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas, maka penelitian ini memberikan saran kepada para pihak antara lain Pemerintah Pusat agar mengatur kembali transfer ke daerah agar benar-benar berdampak langsung kepada yang membutuhkan. Penelitian ini juga memberi saran kepada Pemerintah Pusat untuk mengontrol pertumbuhan penduduk agar pertumbuhan penduduk sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga menghindari kemiskinan.

Terakhir, penelitian ini memberikan saran bagi studi-studi selanjutnya untuk lebih memperdalam variabel lain yang belum terjangkau dan juga memperluas jangkauan waktu penelitian. Selain itu, penelitian ini hanya melihat transfer ke daerah sampai level provinsi saja, sehingga belum dapat menjangkau lebih jauh ke level kabupaten dan kota. Diharapkan penelitian selanjutnya agar menjangkau lebih jauh lagi wilayah penulisan hingga level kabupaten dan kota.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development*, 103, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Azzahra, S., Westi Riani, & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada Tahun 2015-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.215>
- Cahyani, F. N. S. M. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 1–10.
- Christia, A. M., & Ispriyarto, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *LAW REFORM*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Daszykowski, M., Kaczmarek, K., Vander Heyden, Y., & Walczak, B. (2007). Robust statistics in data analysis — A review. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 85(2), 203–219. <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2006.06.016>
- Evita, M. J., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Blora. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(S1).
- Faturohim, A., Akbar, A., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2023). An Analysis of Urban Poverty and Unemployment. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 309–324. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.309-324>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5 ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.
- Hidalgo-Hidalgo, M., & Iturbe-Ormaetxe, I. (2018). Long-Run Effects of Public Expenditure on Poverty. *Journal of Economic Inequality*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s10888-017-9360-z>



- Indraswari, R. R., & Yuhan, R. J. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENUNDAAN KELAHIRAN ANAK PERTAMA DI WILAYAH PERDESAAN INDONESIA: ANALISIS DATA SDKI 2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(1).
- Isramiwarti, R. M. R. dan T. T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau (Riry Isramiwarti, M. Rasuli & Taufeni Taufik).
- Kadji, Y. (2017). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya.
- Macfarlane, A. (2003). *The Savage Wars of Peace*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230598324>
- Mahsunah, D. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9 ed.). Cengage Learning.
- Nalle, F. W., Seran, S., & Bria, F. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 206–220. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.4962>
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan: (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah).
- Nurritzqi, F. A., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 148–163. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.444>
- Puspita, D., Pahlevi, M., & Prasetya, F. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal*.
- Raharto. (2020). Penanggulangan Covid-19 Dalam Kerangka Teori Kependudukan Malthus.
- Ramadhani, A. N., Sartika, D., & Herawaty, H. (2022). Increase in Unemployment Rates During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 15(3).
- Rambe, R. A., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). Kemampuan Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Sumatera Dan Jawa. *CONVERGENCE : THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 2(1), 1–15.
- Rizal, Y., Asnidar, & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Aceh. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 4(1).
- Robinson Sihombing, P., Savitri, C., & Nuraini, A. (2021). *Statistik Multivariat Dalam Riset*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Rotinsulu, D. Ch., & Tenda, A. R. (2016). ANALISIS DAMPAK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGAGGURAN DI SULAWESI UTARA.
- Roy, T., & Riello, G. (2018). *Global Economic History* (1 ed.). Bloomsbury Publishing.
- Sagala, R., & Harlen. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Niara*, 15(3).
- Schoumaker, B. (2004). Poverty and fertility in sub-Saharan Africa: evidence from 25 countries. <https://www.researchgate.net/publication/228830713>
- Sebriana, E. Y., & Cahyono, H. (2022). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KEDIRI. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 2(2).



- Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan Di Indonesia Studi Kasus: (2016-2019). *Samuka*, 5(2). <https://ejournalunsam.id/index.php/jse>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhandi, N., Ayu, E., Putri, K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *JURNAL ILMIAH INFORMATIKA GLOBAL*, 9(2).
- Sulistiowati, & Komari, N. (2021). Konflik Peran Ganda Pekerja Wanita Yang Bekerja Dari Rumah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional SATIESP 2021*.
- Syamsul. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di indonesia. *AKUNTABEL*, 17(1). <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Tiangboho Sanogo. (2019). Does fiscal decentralization enhance citizens' access to public services and reduce poverty? Evidence from Côte d'Ivoire municipalities in a conflict setting. *World Development*, 204–221.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9 ed., Vol. 1). Penerbit Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13 ed.). Pearson Education Limited.
- Tselios, V., & Rodríguez-Pose, A. (2022). Can decentralisation help address poverty and social exclusion in Europe? *Papers in Evolutionary Economic Geography*, 22(12).
- Usman, U., & Diramita. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2).
- Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*.
- Warsito, T., Keuangan, P., Stan, N., Korespondensi, A., & Id, T. A. (2019). *ATTAINING THE DEMOGRAPHIC BONUS IN INDONESIA*.
- Widodo, S., & Zakiah, K. (2022). THE EFFECT OF FISCAL BALANCE FUND AND REGIONAL CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX, OPEN UNEMPLOYMENT RATE, WORKFORCE PARTICIPATION RATE, AND PERCENTAGE OF POOR POPULATION. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).